

# KAJIAN: FRAUD (KECURANGAN) LAPORAN KEUANGAN

Anisa Putri., S.E., M.M

## ABSTRACT

*Fraudulent misstatement or omission is deliberate amount or disclosures in financial statement. Perpetrators of fraud from people within the company can be from outside the company. Triggers fraud was caused by greed, needs, pressures, opportunities and rational. Financial statements contain material misstatements may result in financial statements are not presented fairly, in all material respects. Misstatement of financial statements may occur as a result of mistake or fraud. In order companies have a fraud prevention system, then the company makes detection systems, monitoring, reviewing policies and systems in the fields of human resources and operations.*

## PENDAHULUAN

Setiap perusahaan mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi. Laporan keuangan harus disiapkan secara periodik untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja yg telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yg dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Definisi laporan keuangan menurut Munawir (1991 : 2) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan.

SA seksi 312 PSA 04 menyebutkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Salah saji laporan keuangan dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan

Istilah kekeliruan berarti salah saji atau penghilangan secara tidak disengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Menurut SA seksi 312 PSA 06 menyatakan bahwa kekeliruan mencakup :

- Kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan.
- Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta.
- Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### 2.1. Pengertian *Fraud* (Kecurangan)

Kesalahan (*errors*) adalah salah saji atau kealpaan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, yang dalam keadaan tersebut para pengambil keputusan dapat berubah keputusannya, keadaan – keadaan berikut yang termasuk dalam kriteria kesalahan (*errors*) adalah :

- Kesalahan – kesalahan dalam pengumpulan atau pemrosesan data akuntansi yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan.
- Taksiran akuntansi yang tidak benar yang berasal dari salah penafsiran.
- Kesalahan-kesalahan dalam penerapan (aplikasi) prinsip – prinsip akuntansi, yang berkenaan dengan jumlah, klasifikasi, dan cara-cara penyajiannya ataupun pengungkapannya.

Penyimpangan (*irregularities*) adalah salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan yang disengaja, yang dalam keadaan demikian para pengambil keputusan berubah keputusannya. Penyimpangan dalam laporan keuangan ini biasanya menyesatkan bagi pemakai. Istilah yang biasa digunakan adalah kecurangan manajemen (*management fraud*). Kriteria-kriteria yang termasuk dalam penyimpangan, meliputi :

- a. Manipulasi, falsifikasi, dan alterasi catatan-catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan.
- b. Salah penyajian (*misrepresentations*) atau penghapusan (*omissions*) yang sengaja atas transaksi-transaksi dan informasi penting lainnya.
- c. Salah penerapan (*misapplication*) prinsip – prinsip akuntansi terhadap jumlah, klasifikasi, cara penyajian, dan pengungkapan yang disengaja.

*Fraud* (kecurangan) merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

*Fraud* (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi.

*Fraud*, kerap kali kita jumpai di organisasi perusahaan maupun pemerintahan. Pada intinya *fraud* dalam perusahaan merupakan perbuatan kecurangan disengaja yang didasari ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh seseorang, baik karyawan maupun pimpinan yang berakibat merugikan perusahaan, baik secara financial maupun non-financial. Kerugian perusahaan karena *fraud* ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan

Jenis kecurangan (*fraud*) yang terjadi disetiap negara ada kemungkinan berbeda karena setiap praktek kecurangan sangatlah dipengaruhi oleh kondisi tiap negara yang berbeda. Di negara-negara yang sudah maju dimana penegakan hukum sudah berjalan dengan baik, kondisi perekonomian masyarakat secara umum sudah cukup atau lebih dari cukup, sehingga modus operandi dari praktek-praktek kecurangan menjadi lebih sedikit.

Adanya indikasi *fraud* atau kecurangan/penyimpangan pada suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang dilakukan oleh karyawan/pegawainya. penyimpangan ini bisa terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi, baik di bagian manajemen puncak perusahaan maupun pejabat tinggi suatu instansi. *Fraud* (kecurangan) itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. *Fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, pengelola perusahaan dan pegawai yang bekerja untuk meningkatkan kinerja tidak akan pernah tercapai jika dalam perusahaan masih bercokol tindakan-tindakan kecurangan. Dalam rangka memberikan suatu efek jera, memperkecil kerugian akibat kecurangan dan memperbaiki sistem pengendalian maka jika ada indikasi kuat terjadi suatu kecurangan, perusahaan diharapkan mengambil action yang tepat dengan melakukan audit investigatif.

Perusahaan yang memiliki risiko kerugian keuangan karena tindakan kecurangan yang terjadi dapat mengungkapkan siapa pihak yang melakukan kecurangan tersebut yang selanjutnya akan dimintai pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian perusahaan. Selanjutnya agar memiliki dampak efek jera maka perlu diambil tindakan baik administratif maupun hukum terhadap pelaku kecurangan. Terkait dengan tindak lanjut secara hukum atas kecurangan yang ditemukan, maka perusahaan harus memiliki pertimbangan yang menyeluruh mencakup aspek keuangan perusahaan dan aspek legal terkait dengan regulasi terhadap karyawan maupun terhadap perusahaan.

Dengan demikian, efektifitas pengungkapan kecurangan yang terjadi pada perusahaan akan memberikan nilai tambah terutama untuk recovery kerugian yang terjadi, penyempurnaan sistem pengendalian dan menjadikan pelaku potensial lainnya urung melakukan kecurangan. Pada gilirannya, tindakan ini akan memberikan dampak positif bagi nilai perusahaan karena akan memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki management dengan peningkatan kinerja perusahaan baik dari aspek ekonomisnya pengadaan, effisiennya proses bisnis dan efektifitasnya program kerja perusahaan.

## 2.2 Definisi *Fraud* (Kecurangan)

Pengertian *Fraudulent financial reporting* menurut Arens (2005 : 310) adalah sebagai *Fraudulent financial reporting is an intentional misstatement or omission of amounts or disclosure with the intent to deceive users. Most cases of fraudulent financial reporting involve the intentional misstatement of amounts not disclosures. For*

*example, worldcom is reported to have capitalized as fixed asset, billions dollars that should have been expensed. Omission of amounts are less common, but a company can overstate income by omitting account payable and other liabilities. Although less frequent, several notable cases of fraudulent financial reporting involved adequate disclosure. For example, a central issue in the enron case was whether the company had adequately disclosed obligations to affiliates known as special purpose entities.*

Pengertian *Fraudulent Financial Reporting* menurut Iman Sarwoko dkk (2005) adalah salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Menurut Soejono Karni (2000) Audit Kecurangan (*Fraud Audit*) merupakan audit yang bertujuan untuk menemukan kecurangan.

Sementara Tuannakotta (2010) menyatakan *fraud Audit* atau audit forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk *auditing* pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau diluar pengadilan.

Definisi - definisi seperti di atas kesemuanya memiliki satu tujuan untuk kepentingan pribadi dan ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Fraud atau Kecurangan adalah suatu tindakan atau perbuatan disengaja dan menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan ataupun pihak lain.

### 2.3. Unsur – Unsur Kecurangan

- a. Secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (*fraud*) adalah :
- b. Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*)
- c. dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*)
- d. fakta bersifat material (*material fact*)
- e. dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*) untuk tujuan tertentu misalnya menipu
- f. Dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi
- g. dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
- h. Secara langsung atau tidak langsung merugikan orang
- i. Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*)
- j. yang merugikannya (*detriment*) Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.
- k. Adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum
  - l. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok
- m. Kecurangan biasanya mencakup tiga langkah, yaitu:
  1. Tindakan (*the act*).
  2. Penyembunyian (*the concealment*).
  3. Konfers (*the conversion*).

Tindakan kecurangan biasanya adalah pencurian (*theft*). Dalam contoh yang sederhana, pencurian dana kas kecil merupakan tindakan. Apabila tindakan telah selesai, usaha harus dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan kecurangan tersebut. Dalam kasus pencurian kas, memalsukan saldo dalam akun kas merupakan penyembunyian. Setelah aktiva disalahgunakan, dan fakta disembunyikan, pelaku harus mengkonversikan aktiva tersebut untuk menikmatinya. Dalam kasus pencurian dana kas kecil, konversi terjadi apabila pelaku mendepositokan dana tersebut kedalam rekeningnya, atau melakukan pembelian uang kejahatannya.

### 2.4. Faktor – Faktor Pendorong Manusia Berbuat Curang

Sebenarnya apa yang membuat seseorang melakukan fraud, padahal bila tahu bagaimana akhirnya, tentu orang tidak akan melakukan fraud. Apa yang membuat mereka terdorong untuk melakukannya dan membenarkan apa yang mereka lakukan? Secara sederhana dua segitiga berikut ini dapat bercerita banyak tentang hubungan – hubungan yang mendorong terjadinya *fraud*.

Kecurangan dapat dilakukan oleh karyawan, manajemen, pemasok, pelanggan. Contoh kecurangan langsung yang dilakukan karyawan misalnya pengambilan uang kas, persediaan dan peralatan perusahaan, dan kecurangan yang melibatkan pihak ketiga misalnya suap/*kick back/bribe*.

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen misalnya rekayasa laporan keuangan untuk mempertinggi laba bersih, investasi fiktif (*investment scams*) dan lain-lain. Kecurangan yang dilakukan oleh pemasok misalnya menaikkan harga sepihak (*overcharge*), pengiriman barang bermutu rendah, kekurangan atau tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar.

Kecurangan yang dilakukan oleh pelanggan misalnya tidak membayar barang yang dikirim, pembobolan bank dan lain-lain. Apa sebabnya orang melakukan kecurangan? Faktor-faktor penyebab kecurangan mungkin karena tekanan (*pressure*) keuangan, penyakit mental, ataupun tekanan karena beban pekerjaan.

## 2.5. Faktor Pemicu *Fraud*

Dalam bukunya yang berjudul *Fraud Examination*, Steve Albrecht (dalam Miyosi Ariefiansyah) mengatakan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, yaitu:

1. Tekanan atau Pressure
2. Kesempatan atau Opportunity
3. Rasional
4. Tekanan atau Pressure

Menurut Amin Widjaja Tunggal, 2001: 3, tekanan keuangan mungkin bias terjadi karena sifat :

1. Tamak,
2. Besar pasak dari pada tiang,
3. Terlilit utang,
4. Kebutuhan biaya pengobatan,
5. Kebutuhan uang mendesak,
6. Kerugian keuangan/aktiva pribadi.
7. Penyakit mental mungkin karena : berjudi, menggunakan obat-obatan terlarang, dan perilaku seksual yang mahal.
8. Tekanan beban pekerjaan mungkin karena lembur jam kerja yang terlalu lama, merasa kurang dihargai sesuai prestasi, jenjang karir (*career path*) yang tidak jelas dan lain-lain.

Beberapa contoh *fraud* yang disebabkan karena adanya tekanan, adalah:

1. Salah seorang karyawan bagian keuangan memanipulasi laporan keuangan dengan me-mark up laba menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya karena tekanan pihak manajemen. *Mark up* laba tersebut dipergunakan untuk menaikkan citra perusahaan di mata investor dan pemegang saham. Dengan begitu secara tidak langsung, kinerja karyawan tersebut juga dianggap baik.
2. Seorang pegawai di suatu perusahaan melakukan tindak korupsi karena tekanan dari sang istri yang memiliki gaya hidup mewah.
3. Pegawai bagian pemasaran melakukan manipulasi penjualan karena tekanan dari perusahaan untuk mendapatkan omzet yang tinggi
4. Kebiasaan buruk seorang karyawan (judi, mabuk-mabukan, dan narkoba) telah menyeretnya untuk melakukan *fraud* yaitu dengan menyelewengkan uang perusahaan yang dipercayakan kepadanya.

Bentuk-bentuk tekanan atau pressure yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* ada 4 ( empat), yaitu:

### 1. *Financial Pressure*

Masalah keuangan memang bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang tidak jujur (*fraud*). Tekanan-tekanan karena masalah keuangan tersebut bisa dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, tidak puas dengan apa yang didapat sekarang ini (rakus), banyak hutang atau tanggungan, dll. Alasan-alasan tersebutlah yang membuat seseorang “terpaksa” melakukan tindakan *fraud*.

Penyebab *Fraudulent Financial Reporting* menurut Imam Sarwoko dll (2005), kecurangan dalam laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini :

1. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.

2. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan.
3. Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

*Fraudulent financial reporting* juga dapat disebabkan karena adanya kolusi antara manajemen perusahaan dengan akuntan publik.

2. *Vice*

Kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging dan tak bisa dihilangkan begitu saja, juga membuat seseorang bisa terdorong untuk melakukan tindakan *fraud*, terlebih bila kebiasaan-kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup banyak, seperti: berjudi, minuman keras, dan prostitusi. Semua kebiasaan-kebiasaan tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk memenuhinya. Itu sebabnya, mengapa seseorang yang sudah kecanduan dengan salah satu hal yang telah disebutkan sebelumnya bisa melakukan *fraud*.

3. *Work- related pressure*

Hubungan yang tidak baik dengan salah satu pihak perusahaan juga bisa membuat seseorang melakukan *fraud*. Ketidakpuasan dalam pekerjaan yang disebabkan karena pihak lain yang ada dalam perusahaan bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak baik berupa *fraud*.

4. *Other pressure*

Tekanan lainnya yang bisa membuat seseorang melakukan *fraud* misalnya: tekanan dari pihak istri atau tunangan yang disertai ancaman yang menyatakan bahwa bila tidak bisa memenuhi semua keinginannya maka ia akan minta cerai atau putus, persaingan dengan teman seangkatan yang membuat seseorang merasa harus melakukan *fraud* agar tidak merasa malu dengan teman seangkatan yang mungkin dinilai lebih sukses, dll. Bila tidak kuat dengan tekanan-tekanan tersebut, seseorang akan memilih untuk melakukan *fraud* demi adanya sebuah pengakuan baik dari istri/ tunangan maupun dari teman. Memang mungkin tindakan tersebut dirasa tidak rasional, namun itulah manusia yang kadang-kadang bisa melakukan sesuatu yang tidak rasional. Hanya karena ingin diakui sebagai orang yang telah sukses dan kaya, seseorang dapat melakukan apa saja termasuk *fraud*. Atau hanya karena tidak ingin istrinya minta cerai atau tunangannya minta putus, seseorang juga rela untuk menjebloskan dirinya ke dalam tindakan yang nista, yaitu *fraud*.

Ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari *fraud* ini, yaitu *fraud by need, fraud by greed and fraud by opportunity*.

Menurut teori GONE terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu: *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

### **Faktor generik**

- a. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.
- b. Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

### **Faktor individu**

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori:

1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko tersebut adalah:
  - a) Misi/tujuan organisasi/perusahaan, ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak (manajemen dan karyawan)

- b) Aturan perilaku pegawai, dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi/perusahaan
  - c) Gaya manajemen, memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi/perusahaan
  - d) Praktik penerimaan pegawai, dicegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.
2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*). Beberapa cara mengurangi kemungkinan keterlibatan dalam kecurangan:
- a) Menciptakan lingkungan yang menyenangkan, misalnya: memperlakukan pegawai secara wajar, berkomunikasi secara terbuka, dan adanya mekanisme agar setiap keluhan dapat didiskusikan dan diselesaikan
  - b) Sistem pengukuran kinerja dan penghargaan, yang wajar sehingga karyawan merasa diperlakukan secara adil
  - c) Bantuan konsultasi pegawai, untuk mengetahui masalah secara dini
  - d) Proses penerimaan karyawan, untuk mengidentifikasi calon karyawan yang berisiko tinggi dan sekaligus mendiskualifikasinya
  - e) Kehati-hatian, mengingat motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sebaliknya produk motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan.

## 2.6. Penyebab terjadinya fraud

Menurut Robert Cockerall (auditor Ernst & Young) dalam makalahnya "*Forensic Accounting fundamental : Introduction to the investigations*" dinyatakan bahwa lingkungan profil fraud mencakup beberapa hal yaitu motivasi, kesempatan, tujuan/objek *fraud*, indikator, metode dan konsekuensi *fraud*. Motivasi dan kesempatan memiliki pengertian yang sama dengan definisi sebelumnya. Tujuan/objek *fraud* adalah sarana yang digunakan untuk mencapai motivasi kecurangan di atas. Indikator fraud mengandung pengertian adanya gejala-gejala yang merujuk kepada pembuktian kecurangan. Metode *fraud* adalah cara-cara yang dilakukan untuk melakukan kecurangan. Sedangkan konsekuensi *fraud* adalah dampak kecurangan yang terjadi pada organisasi tersebut.

- Motivasi : adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan atau suatu organisasi. Alasan pribadi seperti masalah keuangan dapat menjadi motivasi untuk melakukan kecurangan. Untuk suatu organisasi, fraud pun dapat dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan apresiasi yang positif walaupun pekerjaan yang dilakukan tidak baik, misalnya kolusi antara kontraktor/konsultan dengan panitia pengadaan barang/jasa,
- Sarana : mencakup seluruh media yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan, misalnya dokumen kontrak/lelang yang diatur, transaksi keuangan dilakukan secara tunai dan tidak menggunakan pencatatan yang baik, dan lain sebagainya.
- Kesempatan : karena kurangnya pengawasan internal dan pemahaman tentang aturan dapat menjadi ruang terjadinya kecurangan.

## 2.7. Gejala – Gejala *Fraud* (Kecurangan)

Gejala *Fraud* terbagi atas gejala pada manajemen dan gejala pada karyawan / pegawai. Pelaku kecurangan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu manajemen dan karyawan / pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Sedangkan karyawan/pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*). Pelaku kecurangan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu: manajemen dan karyawan. Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut.

### Gejala kecurangan manajemen

1. Ketidacocokan diantara manajemen puncak
2. Moral dan motivasi karyawan rendah
3. Departemen akuntansi kekurangan staf

4. Tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas
5. Kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi
6. Penjualan/laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat
7. Perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama
8. Terdapat kelebihan persediaan yang signifikan
9. Terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.

#### Gejala kecurangan karyawan

1. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian/penjelasan pendukung
2. Pengeluaran tanpa dokumen pendukung
3. Pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar
4. Penghancuran, penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran
5. Kekurangan barang yang diterima
6. Kemahalan harga barang yang dibeli
7. Faktur ganda
8. Penggantian mutu barang

#### 2.8. Tindakan / Perilaku Pelaku Kecurangan (Fraud)

Berikut merupakan daftar perilaku seseorang yang harus menjadi perhatian auditor karena dapat merupakan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan orang tersebut, yaitu:

1. Perubahan perilaku secara signifikan, seperti: *easy going*, tidak seperti biasanya, gaya hidup mewah.
2. Sedang mengalami trauma emosional di rumah atau tempat kerja
3. Penjudi berat
4. Peminum berat
5. Sedang dililit utang
6. Temuan audit atas kekeliruan (*error*) atau ketidakberesan (*irregularities*) dianggap tidak material ketika ditemukan
7. Bekerja tenang, bekerja keras, bekerja melampaui jam kerja, sering bekerja sendiri
8. Gaya hidup di atas rata-rata
9. Mobil atau pakaian mahal.

Kecurangan (*fraud*) adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memperoleh manfaat keuangan oleh si pelaku kecurangan.

#### 2.9. Sumber – Sumber Kecurangan (Fraud)

Pada dasarnya terdapat dua sumber kecurangan, yaitu eksternal dan internal.

Kecurangan eksternal (*external fraud*) adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas. Misalnya, kecurangan eksternal mencakup: kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah; atau pemegang polis terhadap perusahaan asuransi. Oleh pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Tipe kecurangan yang lain adalah kecurangan internal (*internal fraud*). Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan.

1. Oleh pihak perusahaan, yaitu :
  - a. Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*).
  - b. Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*).

Kecurangan mencakup :

1. Penggelapan (*embezzlements*)
2. Manipulasi pelanggaran karena jabatan (*malfeasance*)
3. Pencurian (*thefts*)

4. Ketidakjujuran (*dishonesty*)
5. Kelakuan buruk (*misdeed*)
6. Kelalaian (*defalcation*)
7. Penggelapan pajak (*withholding*)
8. Penyuapan
9. Pemerasan
10. Penyerobotan
11. Penyalahgunaan (*missappropriation*)
12. *Fraudulent*

## 2.10. Klasifikasi kecurangan (*fraud*)

Secara umum kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu :

1. *Management Fraud* (kecurangan manajemen)
2. *Employee Fraud* (kecurangan karyawan)
3. *Computer Fraud* (kecurangan computer)

*Management Fraud* (kecurangan manajemen)

Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut *white collar crime*, karena orang yang melakukan kecurangan biasanya memakai kemeja warna putih dan kerahnyapun putih.

Kecurangan manajemen ada dua tipe antara lain:

1. Kecurangan jabatan.
2. Kecurangan korporasi (misalnya manipulasi pajak)

*Employee Fraud* (kecurangan karyawan)

Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Dibandingkan dengan kesempatan melakukan kecurangan pada manajemen maka kesempatan melakukan kecurangan pada bawahan relatif kecil. Hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai wewenang karena pada umumnya semakin tinggi wewenang semakin besar kemungkinan melakukan kecurangan

*Computer Fraud*

Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan komputer antara lain untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu kantor/perusahaan.Kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer diluar peruntukan yang syah dan perusakam atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri.

## 2.11. Korban Fraud (Kecurangan )

Organisasi usaha sering mengorbankan pelanggannya melalui advertensi yang menyesatkan, substitusi produk dan pola yang sejenis. (Amin Wijaya Tunggal,2001:6).

Terdapat empat kategori utama korban kecurangan yaitu :

1. Pemegang saham  
Pemegang saham sering menjadi korban kecurangan manajemen (*management fraud*) yaitu manajer berusaha secara palsu meningkatkan laba atau aktiva.
2. Investor  
Misalnya investor mengalami kerugian di pasar modal karena tindak pidana yang dilakukan emiten (*insider trading*) dan lain-lain.
3. Perusahaan (*enterprise*)  
Baik organisasi komersial maupun pemerintahan dapat menjadi korban baik kecurangan internal maupun eksternal.
4. Pelanggan

## 2.12. Kebijakan Fraud (Kecurangan)

Kebijakan anti *fraud* ditujukan agar perusahaan memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan, dengan membuat sistem deteksi, pemantauan, dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya manusia (SDM) serta operasional. Modus *fraud* lebih banyak dilakukan oleh orang dalam. Oleh sebab itu, fungsi unit kerja yang mengelola sumber daya manusia atau *human resources* memiliki faktor yang sangat penting dalam menciptakan optimalisasi pelaksanaan kebijakan anti *fraud*.

Mengingat terjadinya tindak kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang dalam, maka kebijakan dan prosedur anti *fraud* yang disusun oleh perusahaan seharusnya lebih banyak terkait kebijakan dan prosedur menyangkut pegawai (*human resources*) yang bekerja di perusahaan tersebut. Beberapa kebijakan dan prosedur *human resources* yang wajib diadakan paling kurang meliputi proses rekrutmen pegawai, pendidikan, transparansi proses rotasi, mutasi - promosi, pemberian sanksi, penghapusan kebijakan yang bias (tidak tegas), pemberian *reward*, integritas, remunerasi, dan sistem kinerja.

Kebijakan dan prosedur *human resources* yang tidak tegas dan kurang transparan merupakan sumber potensi bagi seorang pegawai melakukan *fraud*. Dengan demikian, mutlak bagi unit kerja sumber daya manusia (SDM) atau *human resources* Unit untuk melakukan pengkinian kembali (revisi) kebijakan dan prosedur yang ada saat ini dengan berpedoman pada kebijakan anti *fraud*. Beberapa kebijakan dan prosedur *human resources* yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kebijakan anti *fraud*, paling kurang meliputi:

- a. Kebijakan dan prosedur rekrutmen, paling kurang meliputi: proses pengajuan lamaran, seleksi, pelatihan, pengangkatan sampai dengan penempatan;  
Minimnya informasi mengenai latar belakang seorang pegawai yang akan direkrut menjadi tantangan bagi perusahaan. Belum adanya database mengenai pegawai-pegawai yang sudah di-PHK akibat *fraud* membuat banyak perusahaan harus ekstra hati-hati dalam merekrut pegawai.
- b. Kebijakan dan prosedur rotasi paling kurang meliputi transparansi: alasan seseorang dirotasi, alasan seseorang ditempatkan; dan lamanya seseorang harus dirotasi. Rotasi merupakan hak prerogratif dari manajemen. Namun demikian, tindakan untuk melakukan rotasi seorang pegawai tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan yang kuat, apalagi tanpa melihat latar belakang (kompetensi) yang dimilikinya. Contoh: seorang penagih tunggakan dirotasi ke unit pelayanan nasabah. Hal ini akan menimbulkan dampak kontra-produktif, karena esensi menagih tunggakan dengan melayani nasabah adalah hal yang bertolak belakang. Di sisi lainnya, masih banyak atasan yang mempertahankan staf yang disupervisinya. Para atasan ini tidak mau kehilangan stafnya tersebut karena faktor ketergantungan akan kompetensi yang dimiliki oleh si staf maupun atasan tersebut.
- c. Kebijakan dan prosedur sanksi, paling kurang meliputi: transparansi *equal treatment* (persamaan perlakuan) terhadap pegawai yang dikenakan sanksi, dan menonaktifkan sementara seluruh pegawai yang memiliki keterlibatan langsung dengan kasus pembobolan,  
Secara teoritis, setiap perusahaan sudah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai sanksi pegawainya. Namun demikian, hal yang sering terabaikan adalah pelaksanaannya yang terkadang tidak adil (*equal*). Perlakuan yang tidak sama atau adil inilah yang bisa memicu adanya niat pelaku untuk melakukan *fraud*.  
Prosedur untuk melakukan menonaktifkan sementara seluruh pegawai yang memiliki keterlibatan langsung dengan *fraud* ditujukan agar kasus ini dapat segera terselesaikan dengan baik dan tuntas, sehingga tidak menjaral kemana-mana.
- d. Kebijakan dan prosedur *reward* pegawai paling kurang meliputi transparansi alasan pegawai diberikan *reward*;  
Pada prinsipnya setiap orang ingin dihargai dan/atau dihormati atas prestasi yang diperolehnya. Kinerja yang diperoleh seorang pegawai dengan susah payah, namun ternyata tidak "dilirik", apalagi dihargai oleh manajemen, berpotensi menjadikan yang bersangkutan menjadi dis-motivasi, dan tidak tertutup kemungkinan akhirnya menjadi "bumerang" bagi ybs untuk bekerja asal-asalan.
- e. Kebijakan cuti pegawai, dalam hal ini adalah kebijakan perusahaan untuk melakukan "cuti paksa" (*mandatory vacation*) bagi pegawai yang belum pernah mengambil hak cutinya.  
Salah satu kriteria terjadinya *fraud* adalah pegawai hampir tidak pernah cuti, dengan kata lain selalu rajin masuk kerja. Dengan "dipaksakannya" pegawai untuk mengambil hak cutinya, maka diharapkan pegawai lain yang menggantikannya dapat menemukan apakah yang dilakukan pegawai tersebut sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur ataukah tidak. Tentunya ini masih dapat diperdebatkan, karena tergantung dari kompetensi pegawai yang menggantikannya. Dalam beberapa kasus, terkuaknya *fraud* justru disebabkan adanya hal-hal sepele, yaitu pegawai tersebut tidak masuk (sakit dan/atau sedang mengikuti pendidikan).
- f. Kebijakan dan prosedur renumerasi paling kurang meliputi transparansi alasan perubahan renumerasi dan metode perhitungan renumerasi;

Adanya gap renumerasi posisi jabatan yang terlalu besar dapat membuat "kecemburuan" sosial bagi para pegawai. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi posisi jabatan, maka renumerasi yang diterima akan semakin tinggi (besar) pula. Seseorang menduduki suatu posisi sudah dibekali dengan kemampuan, pengetahuan dan kompetensi yang dipersyaratkan. Artinya pegawai ini memang sudah layak menduduki posisi tersebut. Bawahan akan melihat: apakah atasannya yang notabene memiliki renumerasi besar ini memang sudah layak menempati posisi tersebut atau tidak. Jika tidak, maka akhirnya bawahan akan merasa bahwa adanya *gap* renumerasi dan beban pekerjaan yang berbanding terbalik: renumerasi besar,, tapi kompetensi lemah, di sisi lainnya: renumerasi kecil tapi kompetensi dituntut tinggi.

- g. Kebijakan dan prosedur *know your employee* (KYE) paling kurang meliputi profil setiap pegawai berdasarkan *level* jabatan, unit kerja dan masa kerja; *Fraud* dapat terjadi pada setiap *level* atau posisi pegawai. Penting sekali bagi perusahaan untuk membuat profil para pegawainya, sehingga pemero bahwa *fraud* biasa dilakukan oleh pegawai rendah sudah tidak dapat dijadikan pedoman lagi.
- h. Kebijakan dan prosedur *whistleblower*. Kebijakan dan prosedur *whistleblower* paling kurang mencakup: jaminan kerahasiaan identitas sang *whistleblower* dan *reward* atas tindakan *whistleblower*. Salah satu metode pencegahan *fraud* secara massif adalah adanya *whistleblower*. Secara teori, si *whistleblower* akan dilindungi oleh manajemen. Namun pada prakteknya, sulit! Para *whistleblower* dihadapkan pada 2 (dua) opsi: mereka dimutasikan ke kantor cabang yang terjauh, atau mereka harus tutup mulut dan membiarkan proses *fraud* terus berlangsung.

### **BAB III PENUTUP**

*Fraudulent* merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Pelaku *fraud* bisa dari orang dalam perusahaan juga bias dari luar perusahaan. Pemicu *fraud* antara lain disebabkan karena keserakahan, kebutuhan, tekanan, kesempatan dan rasional.

Laporan keuangan yang mengandung salah saji material dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material. Salah saji laporan keuangan dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan

Agar perusahaan memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan, maka perusahaan membuat sistem deteksi, pemantauan, dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang sumber daya manusia (SDM) serta operasional.